

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR UBIN
KERAMIK**

(STUDI KASUS : IMPOR UBIN KERAMIK DARI TIONGKOK)

Oleh :

Muhammad Soleh

muhammadsolehnst0505@gmail.com

Pembimbing : Dr. H.Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliografi : 10 Buku, 5 Jurnal, 2 Official Reports, 14 Websites

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas KM.12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293

Telp/fax 07561-63277

Abstract

This study describes the trade liberalization which causes a Threat of loss for the domestic industries. Hence, the country implements protectionism policies against its industry from the Threat of imports. This research discusses the interests of Indonesia in imposing an import duty policy of trade safeguard measures on the import of ceramic tiles (case study: the import of ceramic tiles from Tiongkok).

This qualitative research uses the descriptive explanative method, in which the data sources were taken from; books, journals, official articles, mass media, and official websites. The perspective used by the writer in this thesis is the perspective of Mercantilism with the the nation-state level of analysis and the theory used is the theory of protectionism, it can be seen from the efforts of the country to protect the domestic ceramic tiles industries from the threat of ceramic tiles imports from Tiongkok by implementing import duty policy of trade safeguards measures.

The results of this study describes that Indonesia imposed an import duty policy of trade safeguards measures against the import of ceramic tiles is to protect the ceramic tile industries from threat of imports which are cheaper than local ceramic tiles, which causes domestic industries to be threatened in the form of serious losses that is financial losses.

Keywords : Import Duty, Safeguard Measures, National Interest, Protectionism, Mercantilism Perspective

PENDAHULUAN

Lonjakan impor ubin keramik pada tahun 2015-2017 menyebabkan kerugian bagi industry dalam negeri. Sehingga Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili Industri Dalam Negeri penghasil barang ubin keramik mengajukan permohonan untuk melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) atas lonjakan jumlah impor barang ubin keramik. Tindakan pengamanan perdagangan (*Safeguard*) adalah tindakan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah sebagai upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat dari jumlah lonjakan barang impor.

Industri ubin keramik merupakan industri yang sangat menjanjikan di Indonesia. Indonesia sebagai negara konsumtif dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa¹ dan negara yang sedang gencar dalam pembangunannya tentu akan menjadi pangsa pasar strategis bagi produk ubin keramik, namun dalam prosesnya Indonesia tidak akan bisa menguasai pasar domestik seutuhnya terutama di era pasar bebas dibawah kerangka *world trade organization/ WTO*.

Pasar bebas menyebabkan negara lain bebas melakukan perdagangan dengan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekspornya termasuk dalam hal impor ubin keramik, diantaranya negara - negara yang melakukan ekspor ubin keramik ke Indonesia adalah negara Tiongkok, Vietnam dan Thailand. Impor ubin keramik didominasi berasal dari Tiongkok, rata-rata pangsa impor dari

negara ini setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2017 adalah sebesar 97,34%.

Peningkatan impor ini dipicu overcapacity ubin keramik Tiongkok dan Hambatan – hambatan yang diterima Tiongkok berupa Kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa dan India. Uni Eropa menerapkan pengenaan bea masuk 13,9%- 32% yang berlaku sejak 12 maret 2015 yang diperpanjang pada 23 November 2017 dan India menerapkan pengenaan anti dumping sementara yaitu sebesar USD 1,37 permeter persegi. Adanya berbagai hambatan ini menjadikan Tiongkok mencari pasar baru, Indonesia sebagai negara yang dekat dengan Tiongkok yang terhimpun dalam kesepakatan multilateral, ACFTA dan Indonesia juga merupakan pasar potensial karena ditunjang oleh jumlah penduduk yang banyak dan sedang dalam proses pembangunan. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai tujuan baru ekspornya. Hal ini menjadikan lonjakan impor di Indonesia.

Lonjakan impor ubin keramik nyatanya menjadi ancaman kerugian serius bagi industry dalam negeri yaitu berupa kerugian finansial. Kerugian ini adalah kerugian yang apabila terus dibiarkan akan beresiko kepada kerugian serius. Yaitu berupa peningkatan barang yang terjual, penghentian sebagian *line* produksi, dan tenaga kerja yang ada tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya. Tahun 2018, industri ubin keramik dalam negeri semakin terpuruk, hal ini dipicu oleh bea masuk untuk produk ubin keramik Tiongkok turun dari 20% menjadi 5% karena perjanjian dagang penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).² pada saat bea masuk

¹ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?> Di akses pada tanggal 6 septembr 2019

²“ industri keramik kian melemah karena impor” <https://industri.kontan.co.id/news/industri-keramik-kian-melemah-karena-impor>. Di akses pada tanggal 17 november 2019

20% pertumbuhan impor rata –rata naik 21 % namun dengan turunnya tarif ini akan meningkatkan lonjakan impor yang lebih banyak dan tentu akan membuat industri dalam negeri semakin bersaing dan semakin merugi. Impor ubin keramik Tiongkok yang meningkat tentunya harus memperhatikan produsen lokal.

Ancaman kerugian yang dialami industri dalam negeri yang diperparah dengan penurunan bea masuk dalam kerangka ACFTA yang dikhawatirkan akan membuat industri dalam negeri semakin terpuruk, sehingga Asahi mewakili industri dalam negeri melaporkan kepada KPPI untuk dilakukan tindakan pengamanan perdagangan menanggapi laporan kerugian itu, pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan dan pembuktian dan menindak lanjutinya pada peraturan pemerintah melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik yaitu dengan pengenaan tarif surut sebesar 23 %-21%-19 %.

Kerangka Teori

Perspektif

Perspektif Merkantilisme adalah perspektif yang memandang bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan,³ bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting dan dalam peningkatannya negara harus melakukan kebijakan dengan mendorong ekspor dan meminimalisir terjadinya impor. Hal ini ditujukan agar neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif.

³ Deliarnov, “*Ekonomi Politik*”, (Jakarta :Erlangga 2006), hlm. 22-23.

Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perspektif ini adalah Friedrich List,⁴ dalam kekuatan teori produksinya ia menjelaskan bahwa kemampuan menghasilkan lebih penting daripada hasil produksi. Dengan kata lain kekuatan negara tidak tergantung pada banyaknya kekayaan tetapi pada upaya negara tersebut dalam meningkatkan produksinya.

Tingkat Analisa: Negara-Bangsa

Negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik yang berfungsi sebagai pembuat keputusan dalam hal kepentingan nasional. proses pembuatan keputusan di fokuskan terhadap hubungan internasional yaitu politik luar negerinya. Asumsi dari tingkat analisa Negara bangsa ini adalah bahwa semua pembuatan keputusan dimanapun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama sehingga analisa harus ditekankan pada negara- bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara – bangsa. Berdasarkan uraian diatas, tingkat analisa negara-bangsa dapat dilihat dari upaya Indonesia dalam memberlakukan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) perdagangan terhadap impor ubin keramik.

Teori proteksionisme

Proteksionisme merupakan teori kebijakan yang diturunkan dari system merkantilisme, teori ini diartikan sebagai upaya negara dalam melindungi kepentingan dalam negeri. ⁵ berfokus pada ekonomi secara internasional, hal ini terjadi akibat terjadinya ancaman-ancaman terhadap produk local. Umumnya, ancaman ini berasal dari produk impor hasil dari perdagangan internasional yang

⁴ Jackson,Robert and , georg. Sorensen , *pengantar studi hubungan internasional*”,(pustaka pelajar : Yogyakarta 2005), .hal 231

⁵Sumadji P, Yudha Pratama dan Rosita, “*kamus ekonomi edisi lengkap inggris indonesia*”, cet I, (Jakarta : wacana intelektual 2006) , hal. 532

mengakibatkan produk local mengalami kerugian.

Terjadinya ancaman terhadap produk local sehingga dilakukan perlindungan untuk meminimalisir ancaman yang terjadi. Adapun macam-macam cara melindungi kepentingan dalam negeri adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti tata cara niaga, pajak tarif masuk, bea cukai, serta pembatasan kuota.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan Indonesia terhadap industry ubin keramik akibat dari lonjakan impor, dimana Indonesia menerapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor ubin keramik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRY UBIN KERAMIK DALAM NEGERI

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) sebagai asosiasi yang membawahi persatuan industry keramik dalam negeri melapor ke kementerian dalam negeri melalui komite pengamanan perdagangan Indonesia (KPPI). Hal ini sebagai upaya mendapatkan perlindungan terhadap industry dalam negeri yang mengalami ancaman kerugian. Kemudian hal inipun ditindak lanjuti dan terbukti adanya lonjakan impor yang mengancam industry dalam negeri, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk kasus ini adalah tindakan pengamanan perdagangan sebagai instrument yang disahkan oleh WTO. Tindakan pengamanan yang digunakan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP) terhadap impor ubin keramik.

Kerugian yang Dialami Industri Ubin Keramik dalam Negeri

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) mengajukan permohonan kepada KPPI, untuk melakukan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan pada tanggal 26 maret 2018. Perusahaan – perusahaan yang melaporkan itu itu antara lain PT Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Jui Shin Indonesia, PT. Asri Pancawarna, dan PT. Angsa Daya Dimana jumlah produksinya sebesar 52,2% dari total produksi keseluruhan industry ubin keramik dalam negeri, sehingga secara kumulatif merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi ubin keramik industry dalam negeri, dengan arti bahwa industry dalam negeri sudah memenuhi syarat untuk tindakan pengamanan perdagangan.⁶

Perusahaan-perusahaan dalam negeri melaporkan terjadi lonjakan impor yang tidak terperkirakan sebelumnya (*unforeseenable/unexpected*), dimana lonjakan impor ini di dominasi berasal dari Tiongkok. akibat dari lonjakan ini industry dalam negeri mengalami kerugian finansial atau ancaman kerugian yang apabila terus dibiarkan akan mengarahkan kepada kerugian serius. Pada tahun 2018, ancaman ini diperparah dengan turunnya bea masuk untuk ubin keramik Tiongkok akibat dari ACFTA, yang semula 20 % menjadi 5%. Saat 20 % sudah terjadi lonjakan impor dan kerugian apalagi dengan pengenaan bea masuk yang lebih rendah. Kerugian dan ancaman kerugian yang di derita industry dalam negeri ini dilaporkan dalam bentuk data industry dalam negeri tiga tahun terakhir berupa indicator kinerjanya.

⁶ Diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id>

Tabel. 1.1 : Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1.	Jumlah Impor	Ton	858.486	1.069.859	1.257.123
2.	Penjualan domestic	Indeks	100	95	99
3.	produksi	Indeks	100	97	96
4.	Persediaan akhir	Indeks	100	128	123
5.	Produktivitas	Indeks	100	96	94
6.	Keuntungan/kerugian	Indeks	100	163	69
7.	Tenaga kerja	Indeks	100	102	101
8.	Biaya Produksi	Indeks	100	102	107

Sumber : Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI),2018

Berdasarkan tabel diatas akibat dari lonjakan impor menyebabkan pemohon tidak bisa menjual barangnya sehingga penjualan domestik pemohon secara tren mengalami penurunan sebesar 10,8%. Hal ini menimbulkan beberapa tambahan biaya produksi karena terbatasnya penyimpanan persediaan. Turunnya penjualan domestik, pemohon terpaksa menurunkan jumlah produksinya.

Menurunnya jumlah produksi dengan tren penurunan sebesar 2,2%., membuat produktivitas pemohon juga ikut menurun. Hal ini disebabkan karena sebagian *line* produksi terpaksa dihentikan akibat menumpuknya persediaan akhir, sehingga tenaga kerja yang tersedia tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya. Penurunan

penjualan domestic dan peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 3,7% akibat dari lonjakan impor ini, berdampak terhadap penurunan keuntungan dengan tren sebesar 17,1%

Penurunan penjualan memicu kenaikan *inventori*⁷ dengan cepat. Industry dalam negeri dalam mengurangi *inventori* yang tinggi terpaksa mengurangi volume produksinya, sebab dalam kondisi *inventori* yang sangat tinggi, perputaran kas perusahaan menjadi hal wajib yang dilakukan, karena perusahaan membutuhkan dana untuk membayar pihak-pihak yang menjadi *supplier* bahan baku dan lain lain. Industry ubin keramik dalam negeri berada dalam kesulitan, jika industry dalam negeri menghentikan *line* produksi lebih banyak lagi, maka akan semakin menambah pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan perusahaan industry dalam negeri akan semakin merugi.

Peningkatan Impor Ubin Keramik dari Tiongkok

Peningkatan impor ubin keramik dari Tiongkok di Indonesia dipicu adanya Kebijakan – kebijakan dari berbagai negara yang menghambat ekspor ubin keramik Tiongkok seperti Kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa dan India. Uni Eropa menerapkan pengenaan bea masuk 13,9%- 32% yang berlaku sejak 12 maret 2015 yang diperpanjang pada 23 November 2017 dan India menerapkan pengenaan anti dumping sementara yaitu sebesar USD 1,37 permeter persegi.⁸ sehingga membuat negara ini mengalihkan pasarnya ke negara berkembang lainnya..

⁷ Inventory adalah persediaan simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk dijual ke konsumen”

⁸ di akses melalui https://www.business-standard.com/article/pti-stories/anti-dumping-duty-on-import-of-tiles-from-china-116033000992_1.html&prev=searchpada tanggal 17 april 2020

Pangsa pasar Negara tujuan ekspor ubin keramik Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia.⁹ Konsumsi ubin keramik yang tinggi di Indonesia membuat ubin keramik Tiongkok sangat laris di pasaran Indonesia. Pengalihan ekspor ubin keramik ke Indonesia juga disebabkan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan sedang dalam masa pembangunan. Selain didukung oleh itu adanya hubungan kerjasama kedua negara yang terhimpun dalam kesepakatan multilateral yaitu *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)* yang meminimalisir hambatan- hambatan yang terjadi juga menjadi pemicu ekspor ubin keramik Negara ini ke Indonesia.

Tabel 1.2 : Volume Impor Ubin Keramik dari Tiongkok

No	Tahun	Jumlah (Ton)
1	2015	837.137
2	2016	1.061.514
3	2017	1.211.914

Sumber : Badan Pusat Statistik , 2018

Berdasarkan data diatas terjadi lonjakan impor dari Tiongkok dengan tren pertumbuhan sebesar 20,31% . Lonjakan impor ubin keramik ini dikarenakan daya saing keramik Tiongkok di Indonesia sangat baik. Tingkat permintaan konsumen sangat tinggi terhadap ubin keramik impor. Hal ini disebabkan harga ubin keramik impor lebih murah daripada harga ubin industri dalam negeri. Hal ini membuat ubin keramik

Tiongkok menguasai pangsa negara asal impor ubin keramik di Indonesia.

Perbandingan Harga Ubin Keramik dalam Negeri dan Ubin Keramik Impor dari Tiongkok

Ubin keramik impor dari Tiongkok itu lebih murah, dikarenakan harga gas untuk industrinya lebih murah dibandingkan Indonesia sehingga Harga gas untuk Tiongkok sekitar US\$ 5/MMBtu sementara di Indonesia harga di pulau Jawa sekitar 9,1/MMBtu dan harga di Sumatera utara US\$ 12/MMBtu. Selain harga gas lebih murah, biaya pengiriman dari Tiongkok juga lebih murah, biaya pengiriman dari Tiongkok ke Indonesia misalnya ke Medan, harganya lebih murah dibanding pengiriman dari Jawa ke Medan. Biaya transportasi dari Tiongkok ke Medan dikenakan sebesar US\$ 350-US\$ 400 per kontainer. Sedangkan Indonesia, dari Jawa ke Medan dikenakan US\$ 700-US\$ 800 per kontainer,¹⁰.

Tiongkok dapat menjual produknya rata-rata untuk ukuran 60x60 atau 80x80 seharga Rp 75.000 / m². Sedangkan untuk Indonesia lebih mahal dari itu.¹¹ untuk ubin keramik ukuran 40x40 produk dari Tiongkok rata - rata harga Rp 35.000,00/m – Rp 41.000,00/m sedangkan produk lokal rata-rata seharga Rp 48.000,00/m- Rp 60.000,00/m. perbandingan harga yang lebih murah dari industry dalam negeri akan berdampak kepada penjualannya, konsumen

⁹ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181030211328-92-342763/perang-dagang-buat-indonesia-kebanjiran-keramik-china-pada-tanggal-17-april-2020>

¹⁰ Diakses melalui <https://finance.detik.com/industri/d-3291521/ini-yang-membuat-keramik-impor-china-lebih-murah-dari-ri-pada-tanggal-28-april-2020>

¹¹ ibid

akan cenderung memilih harga yang lebih murah mengingat rata - rata sasaran penjualan ubin kelas ini adalah kelas menengah kebawah.

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBERLAKUKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK

Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan -hambatan yang dialami industry ubin keramik dalam negeri. Harga gas dan biaya angkut yang mahal sebagai hambatan internal, pemerintah mengatasinya dengan mengusulkan harga gas yang kompetitif dan memberi insentif bagi industri dalam negeri untuk mendukung pembaharuan di industri ubin keramik. Sedangkan mengatasi hambatan eksternal pemerintah memberlakukan kebijakan sebagaimana kebijakan yang dianjurkan oleh *world trade organization (WTO)*. Negara – negara yang mengalami baik itu ancaman kerugian maupun kerugian serius negara berwenang melindungi industri dalam negerinya dengan melakukan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*).

Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya memulihkan kerugian serius maupun mencegah ancaman kerugian, kebijakan ini bukan merupakan dugaan atau tuduhan namun disertai data dan fakta- fakta tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya berupa data lonjakan impor, volume penjualan, volume produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, persediaan laba/rugi, dan tenaga kerja.

Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik.

Tabel 1.3: Besaran BMTP Terhadap impor ubin keramik

No	Periode	Besaran Tarif
1.	2018 -2019	23%
2.	2019-2020	21 %
3.	2020-2021	19 %

Sumber : Kementerian Keuangan RI , 2018

Adapun penghitungan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan dihitung dari nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai dari suatu barang impor yang diberitahukan oleh Importir dan ditetapkan oleh bea cukai. Nilai pabean dikalikan dengan persentase tariff bea masuk tindakan pengamanan sehingga muncul nilai berapa yang harus dibayarkan oleh importir sebagai pajak bea masuk bagi negara.¹²

Bea masuk tindakan pengamanan perdagangan merupakan tambahan bea masuk yang berlaku sehingga bea masuk 5% pada bea Masuk ubin keramik dalam kerangka ACFTA akan dijumlahkan dengan bea masuk pengamanan ini . dengan begitu bea masuk untuk ubin keramik dari Tiongkok menjadi 28 % pada tahun 2019, 26 % pada tahun 2020 dan 24 % pada tahun 2021.hal ini ditujukan sebagai upaya mencegah lonjakan impor dan pemulihan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

¹² Diakses melalui info@custom.go.id pada tanggal 23 mei 2020

Kebijakan Hanya Berlaku untuk Negara dengan Pangsa Impor di Atas 3 %.

Tabel 1.4 : Pangsa Negara Asal Impor Ubin Keramik

(Satuan: %)

No	Negara	2015	2016	2017
1	Tiongkok	97,18	98,84	96,02
2	Vietnam	1,60	0,79	1,61
3	Thailand	0,03	0,00	1,11
4	Negara Lainnya	1,19	0,37	1,26

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Berdasarkan Peraturan pemerintah pasal 90 no 34 tahun 2011¹³, bahwa kebijakan BMTP Hanya Berlaku untuk Negara dengan Pangsa Impor di Atas 3 %. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap produk dari negara manapun sehingga Pemberlakuan BMTP ubin keramik diberlakukan untuk semua negara - negara selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.010/2018 dengan aturan bahwa negara-negara tersebut dengan pangsa impornya di atas 3%. Berdasarkan penyelidikan atas permohonan industry dalam negeri serta dibuktikan oleh KPPI, bahwa hanya satu negara dengan pangsa impor di atas 3% yaitu Tiongkok, sehingga kebijakan ini diberlakukan untuk Tiongkok.

Kebijakan Ditandai dengan *Certifikat Of Origin*

Importir ubin keramik wajib menyerahkan surat keterangan negara asal

¹³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5165/pp-no-34-tahun-2011>

(*Certificate of Origin*), sebagai bukti bahwa importir tersebut mengimpor dari negara yang dikenai BMTP maupun tidak. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) merupakan dokumen pelengkap yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA, yang bertujuan menyatakan bahwa barang yang akan memasuki daerah Pabean diberikan Tarif Preferensi. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.¹⁴

Surat keterangan negara asal (SKA) memudahkan pihak bea cukai mengenakan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor ubin keramik dari negara asal dengan besaran tarif yang dikenakan terhadap masing masing negara Berdasarkan acuan yang sudah ditetapkan. adapun dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian SKA ini adalah *invoice, packing list, Bill of Lading/ Airway Bill*, dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan asal barang¹⁵

Kebijakan dalam Rangka Mendorong Industry dalam Negeri Melakukan Penyesuaian Struktural

Tindakan pengamanan perdagangan sebagai upaya mendorong industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian struktural. Tujuan dari penyesuaian structural ini adalah mendorong pembaharuan baik dari kualitas, kuantitas, penguatan potensi produksi dan sasaran penjualan sebagai upaya mendorong daya saing industri dalam negeri ketika Tindakan pengamanan perdagangan masa berlakunya sudah

¹⁴ Diakses

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/229~PMK.04~2017> pada tanggal 29 mei 2020

¹⁵ Ibid

berakhir. Hal ini dilakukan karena kerugian yang dialami industri dalam negeri merupakan kerugian yang beresiko terhadap kerugian serius sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkannya.

Industri-industri dalam negeri dalam hal ini pemohon akan melakukan penyesuaian structural ini, dimana perusahaan-perusahaan akan melakukan di antaranya : menyiapkan *line* produksi baru, pembaharuan dengan motif baru, perbaikan standar kualitas, pembaharuan dengan teknologi yang lebih canggih, peningkatan kualitas SDM, dan penambahan *Channel Distribution*.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa bea masuk tindakan pengamanan perdagangan merupakan suatu cara negara sebagai wadah yang memiliki fungsi regulasi yang mengatur jalannya perekonomian dalam negeri dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui terciptanya kompetisi yang adil yang menjamin kenyamanan bagi pelaku industri dalam negeri di tengah maraknya impor dengan berbagai ragam barang yang ditawarkan dengan harga yang berbeda dan tentunya menjadi ancaman bagi produk dalam negeri. Lonjakan impor ubin keramik yang mayoritas dari Tiongkok terbukti menyebabkan ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Hal ini sudah melalui proses penyelidikan, pembuktian dan penentuan adanya ancaman kerugian maupun kerugian serius.

KPPI dalam penyelidikannya menjelaskan, bahwa akibat dari lonjakan impor ubin keramik ini penjualan domestik mengalami penurunan yang menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan dan berakibat kepada tambahan biaya produksi akibat dari terbatasnya tempat persediaan.

turunnya penjualan membuat industri dalam negeri menurunkan produksinya yang menyebabkan tren produktivitas mengalami penurunan sehingga sebagian *line* produksi terpaksa dihentikan yang mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat dioptimalkan, sehingga menyebabkan industri mengalami kerugian finansial.

Lonjakan impor ubin keramik apabila teruskan dibiarkan akan berakibat kepada penghentian produksi ubin keramik dalam negeri yang mengakibatkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap para tenaga kerja. Sehingga akibat dari dampaknya ini, penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP) selama 3 tahun dengan tariff surut 23%-21%-19% merupakan tindakan yang tepat untuk memulihkan ancaman kerugian serius guna untuk menekan lajunya impor dan agar selama penerapan BMTP ini industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural dan diharapkan apabila penerapan kebijakan ini berakhir industri dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor. Hal ini sesuai dengan fungsi negara yang menjamin adanya persaingan yang kompetitif yang adil.

¹⁶ Diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id> pada tanggal 29 mei 2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barutu, Christophorus. 2007. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: PT.Citra Adutya Bakti.

Caporaso, James A. dan David P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik* Yogyakarta : Pustaka Fajar.

Hadi, Hamdan. 2009. *Ekonomi Internasional: Edisi revisi*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Kementerian Perdagangan. 2018. *Kementerian Perdagangan : Garda Depan Pembela Ekspor Indonesia*, Jakarta : Kementerian Perdagangan RI.

Mas'ood, Mochtar. 1990 *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES.

_____,2008. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Purwito, Ali. 2010. *Kepabean dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Kajian Hukum fiscal FHUI, Universitas Indonesia,

Rangkuti, Nurhadi, Inge Pojoh dan Naniek Harkantiningih, 2008. *Buku Panduan Analisis Keramik*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Steans, Jill dan Llyoid Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan - Temuan Empiris*, Jakarta:Pustaka LP3S Indonesia.

Jurnal

Arry, Bainus dan Junita Budi Rachman. 2018. *Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*, Intermeric: Journal of International Studies, Vol. 2, No. 2

Figer,Francis and Sonami, W. 2001. *Antidumping as Safeguards Policy.Policy Research Working Paper*. World Bank Journal.

Kementerian Perindustrian. 2017. *Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia*, Bandung : Balai Besar Keramik , Vol. 26, No. 1

Risnain, M. 2011. *Politik Hukum Perlindungan Industri Dalam Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*. Jurnal Ilmu Hukum, Universtas Mataram. Vol. 5 No. 3.

Sinaga, Lidya C. 2010. Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 7 No. 2.

Dokumen Resmi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 2014, Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 119 Tahun 2018, Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik.

Website

Diakses melalui <http://www.bbk.go.id/index.php/page/index/188/tugas-fungsi>, pada tanggal 5 Februari 2020

Diakses melalui <https://pui.ristekdikti.go.id/index.php/lembaga/profil/8o2pDR3> pada tanggal 7 Februari 2020

Diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/17291/Industri-Keramik-Nasional-Prospektif-Jangka-Panjang> Pada tanggal 21 Februari 2020

Diakses melalui <https://investor.id/archive/optimasi-industri-keramik-nasional> Pada tanggal 21 Februari 2020

Diakses melalui <https://www.industry.co.id/read/7801/peluang-dan-tantangan-industri-keramik-nasional> Pada tanggal 21 Februari 2020

Diakses melalui <http://www.bbk.go.id/index.php/page/index/271/daftar-peraturan> Pada tanggal 21 Februari 2020

Diakses melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48 Di akses pada 12 September 2019

Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180314/12/749608/aturan-dagang-wto-regulator-perlu-berhati-hati-soal-subsidi> pada tanggal 12 maret 2020

Diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/asaki-berharap-safeguard-impor-keramik-segera-diberlakukan> pada tanggal 5 April 2020

Diakses melalui https://www.business-standard.com/article/pti-stories/anti-dumping-duty-on-import-of-tiles-from-china-116033000992_1.html&prev=search pada tanggal 17 april 2020

Diakses melalui <https://finance.detik.com/industri/d-3291521/ini-yang-membuat-keramik-impor-china-lebih-murah-dari-ri> pada tanggal 28 april 2020

Diakses melalui <http://capexil.org/export-of-ceramic-tiles-to-indonesia/> pada tanggal 28 april 2020

Industri Keramik Lokal Kian Terimpit Impor China, di akses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/industri-keramik-lokal-kian-terimpit-impor-china> Di akses pada 12 September 2019

Industri keramik kian melemah karena impor di akses melalui

<https://industri.kontan.co.id/news/industri-keramik-kian-melemah-karena-impor>. Di akses pada tanggal 17 november 2019